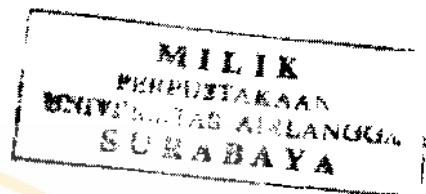


**SKRIPSI**

**ANNISA FAUZIA**

**OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU  
BATAM DAN PEMERINTAH KOTA BATAM DALAM  
MENANGANI PEMBERIAN HAK ATAS BAGIAN TANAH  
HAK PENGELOLAAN KEPADA PIHAK KETIGA DENGAN  
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

**OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU  
BATAM DAN PEMERINTAH KOTA BATAM DALAM  
MENANGANI PEMBERIAN HAK ATAS BAGIAN TANAH  
HAK PENGELOLAAN KEPADA PIHAK KETIGA DENGAN  
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**

**Penyusun**

**Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 131 999 628**

**Annisa Fauzia**  
**NIM. 030015018**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji**

**Pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2003**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Sumardji, S.H., M.Hum.**

**Anggota : 1. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.**

**2. Urip Santoso, S.H., M.H.**

**3. Sri Winarsih, S.H., M.H.**

**4. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.**

## BAB V

### P E N U T U P

#### I. KESIMPULAN

- a. Pihak yang paling berhak dalam menangani pemberian hak atas bagian tanah hak pengelolaan adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) dengan dasar antara lain yang dijadikan dasar yang kuat bagi OPDIPB untuk tetap jalan walaupun terjadi masalah dalam opim didalam masyarakat yaitu dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 tahun 1977 yang menetapkan bahwa Hak Pengelolaan diberikan kepada pihak OPDIPB. Namun dengan lahirnya UU. No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, OPDIPB harus bergerak dengan patner kerjanya yaitu Pemerintah Kota Batam dalam menangani masalah pertanahan dalam hal ini masalah hak pengelolaan karena diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang wewenang Pemerintah kota dalam masalah pertanahan yaitu antara lain adalah penctapan standar administrasi pertanahan.
- b. Pelaksanaan mekanisme pemberian Hak Atas Bagian Tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga yang terjadi di Pulau Batam telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku antara lainnya adalah Undang-Undang Agraria No. 5 tahun 1960, Peraturan Pemerintah No 40 tahun 1996 dan Peraturan Menteri Negara Agraria No 9 tahun 1999



- c. Walaupun terdapat “konflik” yang terjadi antara Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan Pemerintah Kota Batam namun konflik tersebut belum mengganggu perkembangan dunia investasi di daerah tersebut. Hanya saja masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam masalah pertanahan ini di khawatirkan akan beresek pada keberlangsungan dan kenyamanan dunia investasi di Pulau ini.

## 2. SARAN

- a. Dengan adanya Undang-undang No. 22 Tahun 1999, perlu ada peraturan pelaksanaan yang lebih jelas agar dalam praktek dilapangan tidak bersinggungan dengan peraturan yang lain.
- b. Pentingnya Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dalam hal melakukan pensertipikatan sebelum tanah tersebut diperuntukkan penggunaannya kepada pihak ketiga.
- c. Harus ada tindak lanjut dari Keputusan Bersama Walikota dan Kantor Otorita Batam No.05/SKB/HK/VI/2000 mengenai Pembentukan dan Susunan Tim Perancang Draft Peraturan Pemerintah Tentang Pengaturan Hubungan Kerja Pemerintah Kota Batam dengan Badan Otorita Batam, agar perang opini yang dilakukan selama ini dapat berakhir, karena itu akan menjadi preseden buruk bagi dunia usaha dan hukum di wilayah itu